

**RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD  
KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023**



**JALAN FIRDAUS NO 1 SINGKAWANG  
TELP. ( 0562 ) 632455**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Revisi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2022 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja OPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2023. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kota Singkawang Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang tahun 2023 – 2026 .

Adapun penyusunan Rencana Kerja OPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kota Singkawang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Sekretaris DPRD Kota Singkawang

**KARIM, SH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641103 198510 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan hukum .....	3
1.3. Maksud dan tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD .....	6
2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD .....	26
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD .....	27
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD .....	28
2.5. Penelaahan usulan kegiatan.....	40
<b>BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional .....	33
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD .....	47
3.3. Program dan kegiatan .....	55
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	65

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Singkawang sampai dengan Tahun 2022 .....	12
Tabel 2.2	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Singkawang .....	29
Tabel 2.3	Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2023 .....	28
Tabel 3.1	Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan .....	47
Tabel 3.2	Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	48
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan aturan secara rinci untuk penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat

beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 (RKPD).
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang - undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;
21. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 Tanggal 25 Maret 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang



Tahun 2022 Nomor 15).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2023.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023, meliputi:

- BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, review terhadap rancangan awal Sekretariat DPRD.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
- BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2023.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang selanjutnya ditegaskan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Peraturan Walikota Singkawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Serta Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/431/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. maka tugas, fungsi Sekretariat DPRD sebagai berikut : **“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.”**

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka **Tujuan** yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2023 - 2026 adalah **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kota Singkawang harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, **Sasaran** yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

**“Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD”**

Pencapaian kinerja serta sasaran tahun 2022 dituangkan dalam 2 (dua) Program 14 (empat belas) Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan sebagai berikut:

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - d. Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

## Anggaran

3. Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Mebel
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

- c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 10. Layanan Administrasi DPRD
  - a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
  - 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
    - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
    - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
    - c. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
  - 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
    - a. Pembahasan KUA dan PPAS
    - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
    - c. Pembahasan APBD
    - d. Pembahasan APBD Perubahan
    - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
  - 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
    - a. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
  - 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
    - a. Pendalaman Tugas DPRD
    - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
    - c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
    - d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
    - e. Penyusunan Program Kerja DPRD
  - 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
    - a. Pelaksanaan Reses
  - 6. Fasilitasi Tugas DPRD
    - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Adapun pencapaian target kinerja dari semua kegiatan dapat dilihat pada hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

### Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan pelayanan DPRD.	100%	100%	100%

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 Triwulan pertama belum ada yang memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan.

- Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya:
  - Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
  - Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur;
  - Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;
  - Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.
- Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja OPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan profesional, diantaranya:
  - Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
  - Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
  - Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
  - Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
  - Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:
  - Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak terkait dalam perencanaan kegiatan dan penganggarnya;
  - Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun OPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
  - Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang baik dibidangnya;
  - Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

**Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember  
Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2021**

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2023)		Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
			K	Rp		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)			
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
4	02		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>													
4	021	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	25,153,760,468	0	100%	23,318,847,869	80%	20,341,355,310	87%	100%	24,352,844,925	44,694,200,235	178%	
4	021	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%	133,387,771			43,644,224		35,099,830	80%		39,379,500	74,479,330	56%	
4	021	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,473,295			2 dokumen laporan		2 dokumen laporan	11,497,940	93%	2 dokumen laporan	9,379,500	20,877,440	220%



4	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25,928,619								0	0%
4	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,878,619								0	0%
4	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25,928,619								0	0%
4	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,878,619								0	0%
4	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20,200,000	3 dokumen	21,268,584	3 dokumen	20,847,490	98%	4 dokumen	20,000,000	40,847,490	202%
4	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10,100,000	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	2,754,400	28%	4 dokumen	10,000,000	12,754,400	126%
4	0	0	2	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>2,226,421,417</b>		<b>20,533,744,512</b>		<b>17,970,075,603</b>	<b>88%</b>		<b>20,569,724,367</b>	<b>38,539,799,970</b>	<b>1731%</b>

4	0201201	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1,943,059,655		30 anggota DPRD, 29 ASN, 20 THL	20,303,588,024	30 anggota DPRD, 29 ASN, 20 THL	17,747,013,973	87%	30 anggota DPRD, 29 ASN, 20 THL	20,289,168,167	38,036,182,140	1958%
4	0201202	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202,767,600		bend, pembend, PPK, pengguna anggaran, PPTK, pengurus brg	127,920,000	bend, pembend, PPK, pengguna anggaran, PPTK, pengurus brg	125,370,000	98%	Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	200,760,000	326,130,000	161%
4	0201203	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	41,100,435		250 SPM dan 2 laporan	39,911,600	250 SPM dan 2 laporan	38,855,975	97%	250 SPM dan 2 laporan	40,693,500	79,549,475	194%
4	0201204	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	48 Dokumen	22,207,476		48 dokumen pelaporan	23,506,088	48 dokumen pelaporan	23,350,800	99%	48 dokumen pelaporan	21,987,600	45,338,400	204%
4	0201205	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,050,000		1 dokumen	30,172,800	1 dokumen	27,001,765	89%	1 dokumen	5,000,000	32,001,765	634%

4	0	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	12,236,251		2 dokumen	8,646,000	2 dokumen	8,483,090	98%	2 dokumen	12,115,100	20,598,190	168%
					Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0		6 dokumen	18,660,980	6 dokumen	17,497,875	94%	6 dokumen	25,671,900	43,169,775	
4	0	0	2	0	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>84,483,455</b>		<b>0</b>	<b>59,922,325</b>		<b>50,158,400</b>	<b>84%</b>	<b>0</b>	<b>68,795,500</b>	<b>118,953,900</b>	<b>141%</b>
4	0	0	2	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	15,000,000								0	0%	
4	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	69,483,455		2 laporan	59,922,325	2 laporan	50,158,400	84%	2 laporan	68,795,500	118,953,900	171%
4	0	0	2	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas</b>	<b>100%</b>	<b>209,085,000</b>		<b>0</b>	<b>98,217,600</b>		<b>46,451,200</b>	<b>47%</b>	<b>0</b>	<b>147,085,000</b>	<b>193,536,200</b>	<b>93%</b>
4	0	0	2	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10,000,000								0	0%	
4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15,000,000		30 stel	23,296,000	30 stel	23,296,000	100%	0 stel	-	23,296,000	155%
4	0	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	5,000,000								0	0%	

4	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	3,000,000									0	0%
4	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	3,000,000									0	0%
4	0	0	2	0	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	2,000,000									0	0%
4	0	0	2	0	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tuga	1 Laporan	2,000,000									0	0%
4	0	0	2	0	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3 Orang	2,000,000									0	0%
4	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20,000,000									0	0%
4	0	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	147,085,000		180 org	74,921,600	180 org	23,155,200	31%	180 org	147,085,000	170,240,200	116%
4	0	0	2	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>446,624,851</b>		<b>0</b>	<b>492,881,755</b>		<b>437,295,700</b>	<b>89%</b>	<b>0</b>	<b>367,975,100</b>	<b>805,270,800</b>	<b>180%</b>
4	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	18,202,321		135 bh lampu, 10 komponen listrik	31,345,261	135 bh lampu, 10 komponen listrik	30,227,000	96%	21 Item	18,022,100	48,249,100	265%

4	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	104,397,640		3 item bahan material, 1 item belanja jasa	222,052,500	3 item bahan material, 1 item belanja jasa	179,255,000	81%	25 Set karangan bunga 7 balih o	103,364,000	282,619,000	271%
4	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	25,865,898			-		-		14 item barang	25,609,800	25,609,800	99%
4	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	90,000,592		20 item cetak, 58.000 copy, 350 jilid	73,123,994	20 item cetak, 58.000 copy, 350 jilid	69,757,900	95%	20 item cetak 58000 copy 350 jilid	89,139,200	158,897,100	177%
4	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen	82,658,400		5 koran, 1 majalah dan iklan	83,040,000	5 koran, 1 majalah dan iklan	75,720,000	91%	3 koran 11 iklan	81,840,000	157,560,000	191%
4	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50,000,000									0	0%
4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,500,000		1 Tahun	83,320,000	1 Tahun	82,335,800	99%	1 Tahun	50,000,000	132,335,800	262%
4	0	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5,000,000									0	0%

4	0	0	2	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5,000,000							0	0%	
4	0	0	2	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,431,807,872</b>		<b>582,986,500</b>		<b>564,674,850</b>	<b>97%</b>	<b>0</b>	<b>778,967,200</b>	<b>1,343,642,050</b>	<b>94%</b>
4	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	231,397,767		-		-			273,967,700	273,967,700	118 %
4	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	150,000,000								0	0%
4	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	550,410,105		582,986,500		564,674,850	97%	24 item barang	504,999,500	1,069,674,350	194 %
4	0	0	2	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,735,496,863</b>		<b>1,041,822,929</b>		<b>873,414,476</b>	<b>84%</b>	<b>0</b>	<b>1,612,474,479</b>	<b>2,485,888,955</b>	<b>143 %</b>
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2,500,000								0	0%

4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	314,330,098		48 rekening	258,418,969	48 rekening	188,637,764	73%	48 rekening	311,217,919	499,855,683	159%
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Laporan	104,397,640									0	0%
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan	1,314,269,125		4.020 porsi nasi lengkap, 4.740 porsi snack ,35 brg pembersih kantor	783,403,960	4.020 porsi nasi lengkap, 4.740 porsi snack ,35 brg pembersih kantor	684,776,712	87%	47 Item	1,301,256,560	1,986,033,272	151%
4	0	0	2	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>427,294,943</b>		<b>0</b>	<b>195,288,739</b>		<b>139,236,651</b>	<b>71%</b>	<b>0</b>	<b>244,846,479</b>	<b>384,083,130</b>	<b>90%</b>
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77,749,800		1 Tahun	105,922,000	1 Tahun	73,038,001	69%	2 Unit	76,980,000	150,018,001	193%
4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	49,692,000			-		-		5 Unit	49,200,000	49,200,000	99%
4	0	0	2	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	13,498,650			-		-		30 Unit	13,365,000	13,365,000	99%

4	0	0	2	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	180,000,000							0	0%		
4	0	0	2	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	45,952,980		1 Tahun	25,680,000	1 Tahun	20,006,350	78%	226 m2/ Tahun 1.342 m2/ Tahun	45,498,000	65,504,350	143 %
4	0	0	2	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	60,401,513		126 unit	63,686,739	126 unit	46,192,300	73%	106 Unit	59,803,479	105,995,779	175 %
4	0	0	2	1	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase fasilitas layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>18,147,298,740</b>			<b>223,440,000</b>		<b>200,859,000</b>	<b>90%</b>	<b>0</b>	<b>477,201,700</b>	<b>678,060,700</b>	<b>4%</b>
4	0	0	2	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang /Bulan	17,676,338,568		60 dokumen	12,000,000	60 dokumen	7,854,000	65%	60 dokumen	10,904,500	18,758,500	0%
4	0	0	2	1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	439,448,172		120 stel	181,440,000	120 stel	179,280,000	99%	120 stel	435,097,200	614,377,200	140 %
4	0	0	2	1	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	31,512,000		30 orang	30,000,000	30 orang	13,725,000	46%	30 orang	31,200,000	44,925,000	143 %
4	0	0	2	1	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>311,859,556</b>			<b>46,899,285</b>		<b>24,089,600</b>	<b>51%</b>	<b>0</b>	<b>46,395,600</b>	<b>70,485,200</b>	<b>23%</b>



4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30 Dokumen	15,000,000							0	0%		
4	0	0	2	0	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52 Laporan	46,859,556	52 kali	46,899,285	52 kali	24,089,600	51%	52 kali	46,395,600	70,485,200	150%	
4	0	0	2		<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>8,259,826,754</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>6,812,812,833</b>	<b>75%</b>	<b>5,090,927,200</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>6,455,785,400</b>	<b>11,546,712,600</b>	<b>140%</b>
4	0	0	2		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi pembentukan perda dan peraturan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,971,339,265</b>			<b>1,405,017,790</b>		<b>827,115,953</b>	<b>59%</b>	<b>0</b>	<b>1,506,276,500</b>	<b>2,333,392,453</b>	<b>118%</b>
4	0	0	2	0	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	127,577,544	1 dokumen	85,415,000	1 dokumen	31,820,500	37%	1 dokumen	126,314,400	158,134,900	124%	
4	0	0	2	0	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	1,221,024,148	8 Peraturan	1,171,997,990	8 Peraturan	795,295,453	68%	8 Peraturan	1,208,934,800	2,004,230,253	164%	
4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	200,000,000		-		-			-	0	0%	
4	0	0	2	0	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	172,737,573	3 dokumen	147,604,800	3 dokumen	-	0%	3 dokumen	171,027,300	171,027,300	99%	
4	0	0	2	0	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	250,000,000								0	0%	
4	0	0	2		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>1,573,016,901</b>			<b>1,021,915,926</b>		<b>759,246,186</b>	<b>74%</b>	<b>0</b>	<b>1,397,540,100</b>	<b>2,156,786,286</b>	<b>137%</b>

4	0	0	2	0	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	138,785,514		2 dokumen	106,800,920	2 dokumen	83,953,490	79%	2 dokumen	137,411,400	221,364,890	160%
4	0	0	2	0	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	138,468,980		2 dokumen	88,479,850	2 dokumen	65,339,500	74%	2 dokumen	137,098,000	202,437,500	146%
4	0	0	2	0	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	387,112,194		2 dokumen	443,447,122	2 dokumen	294,638,796	66%	2 dokumen	383,279,400	677,918,196	175%
4	0	0	2	0	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	375,073,701		2 dokumen	182,448,722	2 dokumen	127,847,600	70%	2 dokumen	371,360,100	499,207,700	133%
4	0	0	2	0	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	161,501,400									0	0%
4	0	0	2	0	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	372,075,112		2 dokumen	200,739,312	2 dokumen	187,466,800	93%	2 dokumen	368,391,200	555,858,000	149%
4	0	0	2	0	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>540,845,639</b>			<b>177,207,950</b>		<b>163,475,524</b>	<b>92%</b>	<b>0</b>	<b>367,173,900</b>	<b>530,649,424</b>	<b>98%</b>
4	0	0	2	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	26,000,000									0	0%
4	0	0	2	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	26,000,000									0	0%

4	0	0	2	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	26,000,000								0	0%
4	0	0	2	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	26,000,000								0	0%
4	0	0	2	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	26,000,000								0	0%
4	0	0	2	0	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	20,000,000								0	0%
4	0	0	2	0	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Laporan	20,000,000								0	0%
4	0	0	2	0	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	370,845,639	1 dokumen	177,207,950	1 dokumen	163,475,524	92%	1 dokumen	367,173,900	530,649,424	143%
4	0	0	2	0	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1,163,884,865</b>		<b>767,308,989</b>		<b>604,019,445</b>	<b>79%</b>	<b>0</b>	<b>904,836,500</b>	<b>1,508,855,945</b>	<b>130%</b>
4	0	0	2	0	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	727,200,000	6 kali	731,946,595	6 kali	573,303,945	78%	6 kali	720,000,000	1,293,303,945	178%

4	0	0	2	0	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15 Dokumen	47,785,221						1 Tahun	47,312,100	47,312,100	99%
4	0	0	2	0	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	95,445,000						7 orang	94,500,000	94,500,000	99%
4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	26,772,474	10 kali	28,821,230	10 kali	27,008,000	94%	10 kali	26,507,400	53,515,400	200%
4	0	0	2	0	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	16,682,170	1 dokumen	6,541,164	1 dokumen	3,707,500	57%	1 dokumen	16,517,000	20,224,500	121%
4	0	0	2	0	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>630,757,984</b>		<b>707,417,178</b>		<b>643,290,400</b>	<b>91%</b>	<b>0</b>	<b>579,958,400</b>	<b>1,223,248,800</b>	<b>194%</b>
4	0	0	2	0	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	25,000,000							0	0	0%
4	0	0	2	0	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	20,000,000							0	0	0%
4	0	0	2	0	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	585,757,984	3 kali	707,417,178	3 kali	643,290,400	91%	3 kali	579,958,400	1,223,248,800	209%
4	0	0	2	0	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>390,670,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4	0	0	2	0	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	370,670,000							0	0	0%

4	0	0	2	0	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	20,000,000								0	0%	
4	0	0	2	0	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>72,312,100</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
4	0	0	2	0	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	25,000,000								0	0%	
4	0	0	2	0	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100 Dokumen	47,312,100								0	0%	
4	0	0	2	0	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>1,917,000,000</b>			<b>2,733,945,000</b>	<b>2,093,779,692</b>	<b>77%</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>3,793,779,692</b>	<b>198 %</b>	
4	0	0	2	0	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	1,717,000,000		1 Tahun	2,733,945,000	1 Tahun	2,093,779,692	77%	1 Tahun	1,700,000,000	3,793,779,692	221 %
4	0	0	2	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	50,000,000								0	0%	
4	0	0	2	0	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen	50,000,000								0	0%	
4	0	0	2	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	100,000,000								0	0%	
							<b>100 %</b>	<b>33,413,587,222</b>	<b>0</b>		<b>30,131,660,702</b>		<b>25,432,282,510</b>	<b>84%</b>		<b>30,808,630,325</b>	<b>56,240,912,835</b>	<b>168 %</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas pokok "Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan Kebutuhan. "Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggara Administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2022, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### 2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2021 dari target/sasaran sebesar 100% rata-rata selama 1 (satu) tahun anggaran dan dengan target Triwulan 1 (pertama) 13,93 % yang artinya pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, belum terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Maret 2021.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2021 (Januari dan Maret) sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya **dampak** terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2018–2022, yaitu :

Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terutama di bulan Januari dan Maret.

Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasi aparatur Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang ditandai dengan kurang disiplin sehingga mengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masih berjalan tiga bulan Januari dan Maret 2021. Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang antara lain :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD.

- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
- d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- f. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2022, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2022 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan didaerah adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.2.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD**  
**tahun 2023 Kota Singkawang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	get capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DPRD				33,413,587,222	SEKRETARIAT DPRD				33,413,587,222	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SET-DPRD	Persentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		25,153,760,468	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SET-DPRD	Persentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		25,153,760,468	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SET-DPRD	Persentase fasilitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%	133,387,771	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SET-DPRD	Persentase fasilitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%	133,387,771	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,473,295	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,473,295	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25,928,619	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25,928,619	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,878,619	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,878,619	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25,928,619	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25,928,619	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,878,619	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,878,619	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20,200,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SET-DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10,100,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SET-DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10,100,000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>2,226,421,417</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>2,226,421,417</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SET-DPRD	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1,943,059,655	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SET-DPRD	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1,943,059,655	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202,767,600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	202,767,600	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	41,100,435	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	41,100,435	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	48 Dokumen	22,207,476	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	48 Dokumen	22,207,476	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,050,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,050,000	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	12,236,251	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	12,236,251	
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>84,483,455</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>84,483,455</b>	

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	15,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	69,483,455	Penatausahaan Barang Milik Daerah	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	69,483,455	
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas</b>	<b>100%</b>	<b>209,085,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas</b>	<b>100%</b>	<b>209,085,000</b>	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	SET-DPRD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	SET-DPRD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SET-DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SET-DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15,000,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	5,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	3,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	3,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SET-DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	147,085,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SET-DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	147,085,000	
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>446,624,851</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>446,624,851</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SET-DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	18,202,321	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SET-DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	18,202,321	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SET-DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	104,397,640	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SET-DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	104,397,640	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SET-DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	25,865,898	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SET-DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	25,865,898	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SET-DPRD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	90,000,592	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SET-DPRD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	90,000,592	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	11 Dokumen	82,658,400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	11 Dokumen	82,658,400	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SET-DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SET-DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,500,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5,000,000	
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,431,807,872</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,431,807,872</b>	
	Pengadaan Mebel	SET-DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	231,397,767	Pengadaan Mebel	SET-DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	231,397,767	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	150,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	150,000,000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	550,410,105	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	550,410,105	
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,735,496,863</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,735,496,863</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	314,330,098	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	314,330,098	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Laporan	104,397,640	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Laporan	104,397,640	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan	1,314,269,125	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan	1,314,269,125	
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>427,294,943</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>427,294,943</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SET-DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77,749,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SET-DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77,749,800	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SET-DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	49,692,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SET-DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	49,692,000	
	Pemeliharaan Mebel	SET-DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	13,498,650	Pemeliharaan Mebel	SET-DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	13,498,650	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	180,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	180,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	45,952,980	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	45,952,980	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	60,401,513	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	60,401,513	
9	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase fasilitas layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>18,147,298,740</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase fasilitas layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>18,147,298,740</b>	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	SET-DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang /Bulan	17,676,338,568	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	SET-DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang /Bulan	17,676,338,568	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	SET-DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	439,448,172	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	SET-DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	439,448,172	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	SET-DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	31,512,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	SET-DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	31,512,000	
10	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>311,859,556</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>311,859,556</b>	

	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30 Dokumen	15,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30 Dokumen	15,000,000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52 Laporan	46,859,556	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52 Laporan	46,859,556	
II	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>8,259,826,754</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>8,259,826,754</b>	
1	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase fasilitasi pembentukan perda dan peraturan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,971,339,265</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase fasilitasi pembentukan perda dan peraturan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,971,339,265</b>	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	127,577,544	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	127,577,544	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	1,221,024,148	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	1,221,024,148	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	200,000,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	200,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	172,737,573	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	172,737,573	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	250,000,000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	250,000,000	
2	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>1,573,016,901</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>1,573,016,901</b>	
	Pembahasan KUA dan PPAS	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	138,785,514	Pembahasan KUA dan PPAS	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	138,785,514	

	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	138,468,980	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	138,468,980	
	Pembahasan APBD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	387,112,194	Pembahasan APBD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	387,112,194	
	Pembahasan APBD Perubahan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	375,073,701	Pembahasan APBD Perubahan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	375,073,701	
	Pembahasan Laporan Semester	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	161,501,400	Pembahasan Laporan Semester	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	161,501,400	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	372,075,112	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	372,075,112	
3	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>540,845,639</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>540,845,639</b>	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	26,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	26,000,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	26,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	26,000,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SET-DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	26,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SET-DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	26,000,000	



	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	26,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	26,000,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	26,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	26,000,000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	20,000,000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	20,000,000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Laporan	20,000,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Laporan	20,000,000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	SET-DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	370,845,639	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	SET-DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	370,845,639	
4	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1,163,884,865</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1,163,884,865</b>	
	Pendalaman Tugas DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	727,200,000	Pendalaman Tugas DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	727,200,000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15 Dokumen	47,785,221	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15 Dokumen	47,785,221	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	SET-DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	95,445,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	SET-DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	95,445,000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	26,772,474	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	26,772,474	

	Penyusunan Program Kerja DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	16,682,170	Penyusunan Program Kerja DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	16,682,170	
5	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>630,757,984</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>630,757,984</b>	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	25,000,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	25,000,000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	20,000,000	
	Pelaksanaan Reses	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	585,757,984	Pelaksanaan Reses	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	585,757,984	
6	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>390,670,000</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>390,670,000</b>	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	SET-DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	370,670,000	Penyusunan Kode Etik DPRD	SET-DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	370,670,000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	20,000,000	Pengawasan Kode Etik DPRD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	20,000,000	
7	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitas Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>72,312,100</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitas Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>72,312,100</b>	
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	25,000,000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	25,000,000	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100 Dokumen	47,312,100	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100 Dokumen	47,312,100	
8	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1,917,000,000</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1,917,000,000</b>	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	1,717,000,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	1,717,000,000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen	50,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	100,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	100,000,000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan Musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum OPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum OPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing OPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil Musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan Musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas

dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kota Singkawang Tahun 2022, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2023.

**Tabel 2.5.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kota Singkawang**

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	5	5
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>SET-DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>SET-DPRD</b>	<b>Persentase fasilitas penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>SET-DPRD</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun</b>	<b>100%</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	48 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>SET-DPRD</b>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas</b>	<b>100%</b>		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	SET-DPRD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SET-DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SET-DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SET-DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SET-DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SET-DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SET-DPRD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SET-DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>		
	Pengadaan Mebel	SET-DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit		

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit		
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SET-DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan		
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SET-DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SET-DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		
	Pemeliharaan Mebel	SET-DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SET-DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit		
9	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase fasilitasi layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	SET-DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang /Bulan		
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	SET-DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket		
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	SET-DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang		
10	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>		
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30 Dokumen		
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52 Laporan		
II	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>		

1	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>SET-DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi pembentukan perda dan peraturan daerah</b>	<b>100%</b>		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen		
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen		
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		
2	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>SET-DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>		
	Pembahasan KUA dan PPAS	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		
	Pembahasan APBD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		
	Pembahasan APBD Perubahan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		
	Pembahasan Laporan Semester	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen		
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		
3	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>SET-DPRD</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SET-DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan		
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Laporan		



	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	SET-DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		
4	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>		
	Pendalaman Tugas DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen		
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15 Dokumen		
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	SET-DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		
	Penyusunan Program Kerja DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		
5	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>		
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan		
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Reses	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		
6	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>		
	Penyusunan Kode Etik DPRD	SET-DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		
	Pengawasan Kode Etik DPRD	SET-DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		
7	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>100%</b>		
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen		
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100 Dokumen		
8	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	SET-DPRD	<b>Persentase Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	SET-DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen		

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaah terhadap RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Singkawang yang terdiri dari 15 tujuan, 25 sasaran dan 45 indikator kinerja sasaran.
2. Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 pada RPD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Singkawang dan rumusan program pembangunan sebanyak 93 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Penjabaran RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Singkawang pada Rencana strategis Tahun 2023 - 2026 Menetapkan tujuan “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”. Dengan indikator tujuan yaitu, “*Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD.*”

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam Melaksanakan **Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan**. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkeaulitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

Dalam menunjang meningkatnya kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang trampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

**Tabel 3.1.**  
**Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan**

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Jumlah DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD/ jumlah seluruh anggota DPRD x 100%

### 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

- **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rancangan Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama yang dihadapi perangkat daerah Kecamatan Singkawang Barat serta memperhatikan RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026. Tujuan adalah sesuatu yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, Tujuan dari Sekretariat DPRD adalah, *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*. Dengan indikator tujuan yaitu, *“Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD”*.

- **Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya targetnya masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah, "*Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD*". BSasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah:

1. Meningkatkan kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

**Tabel. 3.2.**

**Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2023**

NO	SASARAN	Indikator Kinerja	Target 100%	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan ( Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100%	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			33.413.587.222
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	24.977.962.378
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%	133.387.771
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.473.295
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.928.619
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.878.619
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.928.619
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.878.619
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.200.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.100.000

				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>3.068.873.327</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.776.459.737
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	211.819.428
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	41.100.435
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	48 Dokumen	22.207.476
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.050.000
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	12.236.251
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>84.483.455</b>
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	15.000.000
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	69.483.455
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas</b>	<b>100%</b>	<b>180.085.000</b>
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.000.000
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.000.000
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	5.000.000
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	3.000.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	147.085.000

				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>431.624.851</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	18.202.321
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	104.397.640
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	25.865.898
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	90.000.592
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	11 Dokumen	82.658.400
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.500.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>931.807.872</b>
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	231.397.767
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	150.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	550.410.105
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.735.496.863</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	314.330.098

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Laporan	104.397.640
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan	1.314.269.125
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>427.294.943</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77.749.800
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	49.692.000
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	13.498.650
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	180.000.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	45.952.980
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	60.401.513
				<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>17.923.048.740</b>
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	17.676.338.568
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	215.198.172
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	31.512.000
				<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>61.859.556</b>
				Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30 Dokumen	15.000.000
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52 Laporan	46.859.556



				<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>8.435.624.844</b>
				<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase fasilitas pembentukan perda dan peraturan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.971.339.265</b>
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	127.577.544
				Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	1.221.024.148
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	200.000.000
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	172.737.573
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	250.000.000
				<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>1.573.016.901</b>
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	138.785.514
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	138.468.980
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	387.112.194
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	375.073.701
				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	161.501.400
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	372.075.112
				<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>540.845.639</b>
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	26.000.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	26.000.000

				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	26.000.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	26.000.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	26.000.000
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	20.000.000
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Laporan	20.000.000
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	370.845.639
				<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.339.682.955</b>
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.152.998.090
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15 Dokumen	47.785.221
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	95.445.000
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	26.772.474
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	16.682.170
				<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>630.757.984</b>
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	25.000.000
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	20.000.000
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	585.757.984
				<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>390.670.000</b>

				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	370.670.000
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	20.000.000
				<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>72.312.100</b>
				Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	25.000.000
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100 Dokumen	47.312.100
				<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.917.000.000</b>
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	1.717.000.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	50.000.000
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen	50.000.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	100.000.000

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2023 sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2022 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang ada 2 Program dan 16 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan, sebagai berikut:

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 4.1 Rencana Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024**

Kode					Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				
								2023		2024		Lokasi
								Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
4	02				SEKRETARIAT DPRD				33.413.587.222		36.400.425.225	
4	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	24.977.962.378	100%	28.058.000.210	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	133.387.771	100%	134.721.648	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%	9.473.295	100%	9.568.028	Set-DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100%	25.928.619	100%	26.187.905	Set-DPRD
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	100%	20.878.619	100%	21.087.405	Set-DPRD
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100%	25.928.619	100%	26.187.905	Set-DPRD
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	100%	20.878.619	100%	21.087.405	Set-DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	100%	20.200.000	100%	20.402.000	Set-DPRD

						Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100%	10.100.000	100%	10.201.000	Set-DPRD	
4	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.068.873.327</b>	<b>100%</b>	<b>2.248.685.629</b>	<b>Set-DPRD</b>	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	100%	2.776.459.737	100%	1.962.490.251	Set-DPRD	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100%	211.819.428	100%	204.795.276	Set-DPRD	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	100%	41.100.435	100%	41.511.439	Set-DPRD	
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	48 Dokumen	100%	22.207.476	100%	22.429.550	Set-DPRD	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100%	5.050.000	100%	5.100.500	Set-DPRD	
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	100%	12.236.251	100%	12.358.613	Set-DPRD	
4	02	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>84.483.455</b>	<b>100%</b>	<b>85.328.289</b>	<b>Set-DPRD</b>	
4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	100%	15.000.000	100%	15.150.000	Set-DPRD	
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100%	69.483.455	100%	70.178.289	Set-DPRD	
4	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>180.085.000</b>	<b>100%</b>	<b>211.175.850</b>	<b>Set-DPRD</b>	

4	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	100%	10.000.000	100%	10.100.000	Set-DPRD
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	100%	15.000.000	100%	15.150.000	Set-DPRD
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	100%	5.000.000	100%	5.050.000	Set-DPRD
4	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	100%	3.000.000	100%	3.030.000	Set-DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	100%	147.085.000	100%	148.555.850	Set-DPRD
4	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>431.624.851</b>	<b>100%</b>	<b>451.121.397</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	100%	18.202.321	100%	18.384.344	Set-DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	100%	104.397.640	100%	105.441.616	Set-DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	100%	25.865.898	100%	26.124.556	Set-DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	100%	90.000.592	100%	90.930.897	Set-DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	11 Dokumen	100%	82.658.400	100%	83.484.984	Set-DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100%	50.000.000	100%	50.500.000	Set-DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100%	50.500.000	100%	51.005.000	Set-DPRD
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	100%	5.000.000	100%	5.050.000	Set-DPRD

4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	100%	5.000.000	100%	5.050.000	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>931.807.872</b>	<b>100%</b>	<b>3.946.125.950</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	2.500.000.000	Set-DPRD
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	100%	505.000.000	Set-DPRD
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	100%	231.397.767	100%	233.711.744	Set-DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	100%	150.000.000	100%	151.500.000	Set-DPRD
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	100%	550.410.105	100%	555.914.206	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.735.496.863</b>	<b>100%</b>	<b>1.752.851.830</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	100%	2.500.000	100%	2.525.000	Set-DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	100%	314.330.098	100%	317.473.398	Set-DPRD
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Laporan	100%	104.397.640	100%	105.441.616	Set-DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan	100%	1.314.269.125	100%	1.327.411.816	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>427.294.943</b>	<b>100%</b>	<b>431.567.891</b>	<b>Set-DPRD</b>

4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100%	77.749.800	100%	78.527.298	Set-DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	100%	49.692.000	100%	50.188.920	Set-DPRD
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	100%	13.498.650	100%	13.633.636	Set-DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	100%	180.000.000	100%	181.800.000	Set-DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	106 Unit	100%	45.952.980	100%	46.412.509	Set-DPRD
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	100%	60.401.513	100%	61.005.528	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.15</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase fasilitasi layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>17.923.048.740</b>	<b>100%</b>	<b>18.328.771.726</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	100%	17.676.338.568	100%	17.853.101.953	Set-DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	100%	215.198.172	100%	443.842.653	Set-DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	30 Orang	100%	31.512.000	100%	31.827.120	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.16</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>61.859.556</b>	<b>100%</b>	<b>467.650.000</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30 Dokumen	100%	15.000.000	100%	15.150.000	Set-DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52 Laporan	100%	46.859.556	100%	200.000.000	Set-DPRD



4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8.435.624.844</b>	<b>100%</b>	<b>8.342.425.015</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	02	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase fasilitas pembentukan perda dan peraturan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.971.339.265</b>	<b>100%</b>	<b>1.991.052.656</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	100%	127.577.544	100%	128.853.319	Set-DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	100%	1.221.024.148	100%	1.233.234.389	Set-DPRD
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	100%	200.000.000	100%	202.000.000	Set-DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	100%	172.737.573	100%	174.464.948	Set-DPRD
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	100%	250.000.000	100%	252.500.000	Set-DPRD
4	02	02	2.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.573.016.901</b>	<b>100%</b>	<b>1.588.747.068</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	100%	138.785.514	100%	140.173.369	Set-DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	100%	138.468.980	100%	139.853.669	Set-DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	100%	387.112.194	100%	390.983.315	Set-DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	100%	375.073.701	100%	378.824.438	Set-DPRD
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	100%	161.501.400	100%	163.116.414	Set-DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	100%	372.075.112	100%	375.795.863	Set-DPRD

4	02	02	2.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>540.845.639</b>	<b>100%</b>	<b>546.254.095</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	100%	26.000.000	100%	26.260.000	Set-DPRD
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	100%	26.000.000	100%	26.260.000	Set-DPRD
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	100%	26.000.000	100%	26.260.000	Set-DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	100%	26.000.000	100%	26.260.000	Set-DPRD
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	100%	26.000.000	100%	26.260.000	Set-DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	100%	20.000.000	100%	20.200.000	Set-DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Laporan	100%	20.000.000	100%	20.200.000	Set-DPRD
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	100%	370.845.639	100%	374.554.095	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.339.682.955</b>	<b>100%</b>	<b>1.175.523.712</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	100%	1.152.998.090	100%	734.472.000	Set-DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15 Dokumen	100%	47.785.221	100%	48.263.073	Set-DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	100%	95.445.000	100%	96.399.450	Set-DPRD

4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	100%	26.772.474	100%	27.040.198	Set-DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	100%	16.682.170	100%	16.848.991	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>630.757.984</b>	<b>100%</b>	<b>637.065.563</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	100%	25.000.000	100%	25.250.000	Set-DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	100%	20.000.000	100%	20.200.000	Set-DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	100%	585.757.984	100%	591.615.563	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>390.670.000</b>	<b>100%</b>	<b>394.576.700</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	100%	370.670.000	100%	374.376.700	Set-DPRD
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	100%	20.000.000	100%	20.200.000	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.07</b>		<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>72.312.100</b>	<b>100%</b>	<b>73.035.221</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	100%	25.000.000	100%	25.250.000	Set-DPRD
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100 Dokumen	100%	47.312.100	100%	47.785.221	Set-DPRD
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.917.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.936.170.000</b>	<b>Set-DPRD</b>
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	100%	1.717.000.000	100%	1.734.170.000	Set-DPRD
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	100%	50.000.000	100%	50.500.000	Set-DPRD

4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen	100%	50.000.000	100%	50.500.000	Set-DPRD
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	100%	100.000.000	100%	101.000.000	Set-DPRD
<b>TOTAL</b>									<b>33.413.587.222</b>		<b>36.400.425.225</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kota Singkawang maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan. Maka Kepala OPD akan melakukan tindakan penyesuaian.

Singkawang,            2022  
Sekretaris DPRD Kota Singkawang

**KARIM, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641103 198510 1 001